

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang Masalah.

Keaneka ragaman kultural, sosial, dan politik adalah realitas obyektif bangsa Indonesia yang tidak mungkin dinafikan oleh siapapun. Semua keaneka ragaman yang melekat dalam diri setiap manusia Indonesia memiliki hak hidupnya sendiri sebagai bagian yang utuh dari masyarakat Indonesia. Namun peran sentral birokrasi (baik sipil maupun militer) dalam proses politik, korporasi negara atas kelompok-kelompok kepentingan masyarakat, dominasi eksekutif atas yudikatif dan legislatif, kooptasi atas elit politik yang mendukung rezim di satu pihak dan represi atas oposisi di pihak lain telah menimbulkan implikasi tersendiri dalam konteks integrasi nasional pasca Orde Baru. Implikasi tersebut telah menjadi setumpuk pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan, sehingga membutuhkan opsi-opsi untuk merekonstruksi integrasi nasional ditengah-tengah euforia politik yang sedang berlangsung. Sebab era reformasi diikuti pula dengan gejala politik aliran, walaupun lebih banyak variasi jika dibandingkan dengan tahun 1950-60an. Misalnya saja, Partai Politik (baca: parpol) peserta pemilu pada tahun 1999. Dari 48 parpol kontestan pemilu, ada 15 partai yang memiliki asal-usul sampai kemasa sebelum tahun 1950an, dan 8 parpol bisa dianggap memiliki hubungan emosional dengan parpol terdahulu. Dari keseluruhan kontestan pemilu 1999 hanya ada sekitar 52% yang dapat dikategorikan sebagai parpol baru dari kelompok baru dengan pemikiran politik baru.<sup>1</sup>

Padahal wawasan kebangsaan Indonesia dalam rangka *nation and character building* menghendaki terwujudnya peningkatan standar hidup, tata politik yang efektif serta keadilan sosial secara menyeluruh. Akan tetapi praktek kekuasaan dimasa Orde Baru telah melunturkan wawasan dan kesadaran kebangsaan yang demikian. Rezim Orde Baru terlalu menekankan pada integrasi wilayah dalam rangka pembangunan negara (*State Building*) sehingga mengabaikan aspek integrasi yang lain, dan pada gilirannya memperburuk kinerja rezim dalam mempertahankan integrasi politik. Bahkan rezim cenderung memperkokoh integrasi kekuasaan elit daripada integrasi nasional, di mana stabilitas politik lebih diarahkan pada stabilitas kekuasaan daripada stabilitas

---

<sup>1</sup> Koirudin, *Partai-partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Hal. 91; dan *Partai-parti Politik Indonesia: Ideologi, Strategi, dan Program*, Jakarta: Kompas, 1999.

pemerintahan, sementara pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir elit dan kroni-kroninya.

Integrasi nasional model Orde Baru hanya mempersatukan berbagai daerah yang sangat heterogen secara sosio-kultural ke dalam satu kesatuan wilayah politik semata. Ia melupakan bahwa hakekat dan cara mencapai integrasi itu sendiri sangat penting artinya. Bahkan dalam prakteknya, Orde Baru tidak peduli terhadap perseorangan atau sekelompok orang yang menjadi korban dan dikorbankan, termasuk pihak-pihak mana saja yang diuntungkan di dalam integrasi model demikian itu. Padahal kebutuhan Indonesia akan suatu integrasi yang bersifat menyeluruh merupakan kebutuhan yang cukup mendesak, apalagi sebagai bangsa majemuk dengan wilayah yang menyebar diantara samudera Hindia dan Pasifik, serta diapit oleh benua Asia dan Australia, Indonesia tidak sekedar membutuhkan *state building* tetapi juga *nation and character building*.

Akibatnya sepanjang masa pemerintahan Orde Baru kehidupan politik masyarakat mengalami kelumpuhan yang disebabkan oleh pembatasan dan kontrol negara yang sangat kuat. Penguasa membangun struktur politik negara yang bersifat hegemonik dan dominan agar bisa mengontrol serta membatasi partisipasi politik masyarakat.<sup>2</sup> Organisasi atau kelompok - kelompok sosial politik sebagai basis utama kehadiran aspirasi masyarakat dikontrol secara ketat melalui berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, sehingga kelompok-kelompok sosial politik tidak mampu menunjukkan kebebasan dan kemandirian politik. Hal itulah yang membuat masyarakat terdegradasi dalam mengekspresikan aspirasi dan membangun konsensus ketika menghadapi polarisasi yang terfragmentasi dewasa ini.

Ironisnya, kondisi serupa terus berlangsung sampai rezim reformasi. Misalnya saja perilaku integratif yang seharusnya diteladani oleh perilaku elit politik pemerintahan. Realitas tersebut tidak terlepas dari kebijakan depolitisasi massa yang disertai represi secara intens dimasa lalu sehingga membuat rakyat kehilangan daya kritis terhadap kekuasaan. Hal inilah penyebab terjadinya relasi kekuasaan yang timpang antara elit dengan massa. Suatu pola hubungan yang lebih didasarkan pada persepsi subyektif dan distorsi elit itulah yang mengakibatkan ketimpangan kesadaran dan deferensiasi ditengah-

---

<sup>2</sup> Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy), Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998, hal 1.

tengah masyarakat. Sedangkan parpol yang diharapkan mengagregasi aspirasi masyarakat ternyata belum siap melaksanakan peran dan fungsinya akibat depolitisasi yang dijalankan oleh rezim sebelumnya.

Memang, integrasi nasional pada hakekatnya bersifat dinamis dan cenderung mengikuti arus perubahan sosial. Ia sangat tergantung pada cara dan kecenderungan rezim pemerintahan memahami dan memperlakukan aspirasi masyarakat pada ruang dan waktu tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah cara yang ditempuh pemerintah dalam menafsirkan dan mengelola relasi kekuasaan antara negara dengan masyarakat disatu sisi, dan hubungan kekuasaan dari berbagai institusi dan golongan masyarakat disisi yang lain. Kemampuan rezim untuk memenuhi kebutuhan dasar dari setiap unsur bangsa didalamnya secara adil, wajar, dan proporsional juga amat penting. Artinya, demokrasi politik tetap harus mampu memberikan kesejahteraan secara keseluruhan.

Krisis moneter yang disertai krisis ekonomi dan politik sejak pertengahan 1997 telah membawa pengaruh sangat luas bagi Indonesia. Suatu krisis yang mendorong timbulnya gelombang reformasi untuk menata kembali sistem politik, ekonomi, dan hukum menuju kearah yang lebih sehat, adil, dan demokratis. Reformasi juga menimbulkan euforia politik dari sebagian masyarakat di beberapa daerah, seperti di Aceh, Papua, dan lepasnya provinsi Timor - Timur. Euforia yang lahir dari kejatuhan rezim otoriter, represif, dan cenderung menafikan aspirasi itu tampaknya dipandang sebagai momentum untuk menyuarakan kepentingan mereka yang terabaikan selama kurun waktu sekitar 30 tahun.

*Political euphoria* yang lebih merupakan ledakan emosi politik yang tersumbat selama rezim Orde Baru itu kemudian diiringi pula oleh suatu kecemasan masyarakat politik yang tidak terbiasa dengan suasana bebas dewasa ini. Walaupun ada juga kekhawatiran, bahwa jumlah partai yang berlebihan akan membingungkan masyarakat. Bahkan tidak tertutup kemungkinan, parpol akan memecah-belah masyarakat atas dasar agama, ras, garis kelas, dan sebagainya. Jika demikian adanya, maka peran parpol yang diharapkan mampu menjadi pengintegrasi dengan mengedepankan wawasan kebangsaan akan jauh dari impian. Sebab, apabila euforia aspirasi itu gagal dikelola dengan baik maka disintegrasi sulit untuk bisa dihindari. Memang, potensi sumber disintegrasi dapat dari berbagai faktor, khususnya bagi suatu negara yang tengah bergolak dan mengalami transisi demokrasi seperti Indonesia. Boleh jadi struktur politik yang tidak aspiratif dan

cenderung memanipulasi aspirasi ditambah dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan faktor yang memperbesar potensi disintegrasi.

Bagaimanapun juga reformasi telah mengawali terjadinya perubahan struktur sosial politik Indonesia. Suatu liberalisasi politik yang ditandai dengan adanya kehidupan multipartai, Pilpres / Pilkada langsung, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat adalah sebagian dari perubahan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Tetapi perlu diwaspadai, sebab transisi demokratisasi juga bisa memicu gerakan lokal berbasis identitas. Bahkan isu-isu primordial menjadi hal penting sebagai latar belakang lahirnya berbagai produk peraturan. Demokratisasi yang didasarkan pada rasio dan kebebasan berfikir menemukan perlawanan dari politik identitas yang dimanfaatkan oleh sebagian parpol untuk malakukan “penggabungan kepentingan” (*interest aggregation*) di dalam mencapai kekuasaan politik. Dengan demikian, kegagalan dari parpol sebagai lembaga aktor dari proyek demokratisasi akan dapat menjadi ancaman serius bagi integrasi nasional serta pluralisme negara nasional.

Reformasi memang memberi kesempatan secara luas untuk mendirikan parpol. Reformasi telah melahirkan suatu era demokrasi yang bisa dilihat sebagai upaya mengubah pola hubungan negara dengan massa, negara dengan elit politik, elit politik dengan massa, serta massa dengan massa dari berbagai aspek kehidupan negara nasional. Parpol memegang peranan penting untuk mengubah relasi - kesadaran itu, sepanjang pola rekrutmen politik dilandasi dengan kepekaan pluralisme, ditambah oleh kemauan politik untuk melakukan perubahan dalam memperkecil ketimpangan relasi yang timbul. Jadi munculnya banyak parpol perlu dilihat sebagai keinginan masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih luas. Dengan demikian, maka parpol sebagai wadah partisipasi politik perlu memberi peluang bagi kemajuan kepentingan entitas serta memperjuangkan keterwakilan entitas di dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu parpol harus melakukan rekrutmen, dan pendidikan politik kepada para anggota - kadernya agar deferensiasi di masyarakat tidak kontra produktif.

Integrasi nasional secara menyeluruh merupakan pendekatan alternatif dalam menata, atau paling tidak menyeimbangkan posisi pemerintah dan masyarakat melalui peran parpol dalam penyelenggaraan - pembangunan negara. Integrasi nasional secara menyeluruh dapat dilakukan dengan melembagakan dan mewujudkan nilai-nilai pluralisme. Karena itu parpol perlu menampilkan sosok pemerintahan dengan susunan organisasi yang professional dan efektif, demokratis, konsisten menerapkan prinsip

kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Sebab adanya kerisauan dari sejumlah kalangan terhadap ancaman disintegrasi juga tercermin dari polarisasi sikap parpol mengenai masa depan negara kesatuan RI akibat dari tata pemerintahan yang jauh dari impian masyarakat. Misalnya saja penolakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Kesatuan Pembangunan (PKP) atas gagasan perubahan bentuk negara ke arah federal, bahkan ketua umum PDI Perjuangan dan deklarator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak pemberian kesempatan bagi Timor-timur untuk memisahkan diri dari RI.<sup>3</sup> Sikap politik Partai Golongan Karya (Partai Golkar) juga memberikan penolakan serupa terhadap gagasan federalisme. Akan tetapi Partai Amanat Nasional (PAN) justru sebaliknya, ia melihat urgensi gagasan federalisme sebagai alternatif yang patut dipertimbangkan bagi masa depan bangsa Indonesia.

Selain perbedaan pandangan parpol mengenai masa depan negara nasional, ada hal lain yang patut menjadi pertanyaan atas peranan integrasi nasional dari parpol, terutama ketika menyaksikan pemilihan Presiden langsung tahun 2004. Pada waktu itu calon Presiden dari "*Koalisi Kebangsaan*" di usung oleh parpol pemenang pemilu Legislatif yang secara empiris memiliki sejarah politik cukup panjang sehingga lebih matang. Akan tetapi pada kenyataannya kalah oleh "*Koalisi Kerakyatan*" yang didukung parpol dengan perolehan suara minoritas pada saat pemilu Legislatif, bahkan relatif baru dalam pentas politik nasional. Hal serupa terjadi pada Pilkada langsung di Kabupaten Banyuwangi. Kenyataan lain yang cukup mengejutkan adalah kemenangan calon independen atas partai-partai politik nasional pada pemilihan kepala daerah langsung di provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD).

Realitas tersebut tidak terlepas dari kenyataan masa lalu, ketika rezim Orde Baru menempatkan parpol sebagai bagian dari korporatisme negara sehingga design masa depan negara nasional sepenuhnya berada di tangan eksekutif. Suatu kenyataan yang berbeda dengan rezim reformasi yang menempatkan parpol sebagai aktor bagi masa depan negara nasional melalui fungsi regulasi, artikulasi, dan mengagregasi aspirasi, termasuk rekrutmen kepemimpinan politik. Bagaimanapun juga dalam sistem pemerintahan demokratis, parpol dapat merepresentasikan kepentingan warga negara dalam menyalurkan kepentingan dan aspirasi politik. Disamping kemampuan untuk

---

<sup>3</sup> Kompas, 30 Januari 1999.

Peranan partai politik..., Achmad Suhawi, Pascasarjana-UI, 2008

mewariskan nilai-nilai dan menyiapkan pemimpin - pemimpin masa depan sesuai dengan visi mereka.

Untuk mempelajari peranan integrasi nasional dari parpol terlebih dahulu perlu diklasifikasikan strategi, orientasi program, dan ideologi, termasuk sejarah perjuangan parpol itu sendiri. Bagaimanapun parpol bisa menjadi sarana pengintegrasikan tetapi dapat juga melakukan sebaliknya. Dalam konteks itulah penelitian difokuskan pada dua parpol kontestan pemilu, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (baca : PK Sejahtera) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (baca : PDI Perjuangan). PK Sejahtera merupakan parpol dengan asas Islam - berbasis Kader yang dikategorikan kedalam tiga kelompok secara ketat, meliputi : anggota kader pendukung, anggota kader inti, dan anggota kehormatan.<sup>4</sup> Sebagai partai kader, PK Sejahtera secara historis berkembang akibat hak pilih yang belum "diberikan secara luas". Sebab pada masa Orde Baru, parpol yang ada hanyalah komedi kekuasaan semata - sebagai legitimasi politik melalui pemilu, sehingga tidak mengherankan bila anggota PK Sejahtera kebanyakan adalah kelas menengah atas, dan tidak memerlukan organisasi yang terlalu besar untuk melakukan mobilisasi massa.<sup>5</sup>

Pada awalnya PK Sejahtera hanya populer di kalangan para mahasiswa - kaum cendekiawan muda Islam. Namun seiring dengan perkembangan jaman, partai ini makin meluas tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia melainkan sudah ke pelosok-pelosok daerah. Bahkan pada pemilu 2004 perolehan suara PK Sejahtera meningkat menjadi 7,34% (8.325.020) hingga meraih 45 kursi di DPR. Dalam praksis perjuangannya, PK Sejahtera cenderung menerapkan ideologi secara kaku dan radikal, dimana pimpinan tertinggi melakukan kontrol sangat ketat, dengan rekrutmen anggota yang dilakukan sangat selektif. Karena anggota PK Sejahtera dituntut untuk mengabdikan secara total.

Sebagai parpol primordial, PK Sejahtera mendasarkan dirinya pada Islam. Menurut M. Amien Rais,<sup>6</sup> yang membedakan Islam dengan agama besar lain didunia adalah sentralitas dan universalisme. Hal inilah yang kemudian mengantarkan kesuksesan Islam secara komprehensif dan tercakup kedalam hampir seluruh segi kehidupan masyarakat, termasuk politik dan ekonomi serta berhasil mengembangkan ilmu dan teknologi. Bahkan jika dibandingkan dengan imperium Romawi dan Persia, kekuasaan Islam jauh lebih luas. Jika demikian adanya, maka nasionalisme berdasarkan teritorial

<sup>4</sup> Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga PK Sejahtera dan Peraturan tentang Sistem dan Prosedur Keanggotaan.

<sup>5</sup> Koirudin, *Partai-partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Hal. 78.

<sup>6</sup> M. Amien Rais; dalam Prisma (Nomor Ekstra), *Arah Baru Islam: Suara Angkatan Muda*, Jakarta: LP3ES, 1984

Peranan partai politik..., Achmad Suhawi, Pascasarjana-UI, 2008

negara nasional menjadi tidak berlaku dalam perspektif Islam sebagai ideologi. Sebab parpol Islam seperti PK Sejahtera akan mengikatkan diri pada *Ukhuwah Islamiah*. Artinya, jika kepentingan Islam yang diartikulasikan melalui PK Sejahtera tidak dilakukan pencerahan maka dapat menimbulkan suatu hubungan yang irasional antara politik dan Islam disatu sisi, dan antara hubungan umat dengan negara disisi lain. Berkembangnya pola hubungan yang demikian dapat melahirkan suatu pertentangan ideologi seperti di era Orde Lama sehingga parpol bisa menjadi salah satu sumber disintegrasi nasional.

Berbeda dengan PK Sejahtera, PDI Perjuangan adalah partai massa berasaskan Pancasila 1 Juni 1945.<sup>7</sup> PDI Perjuangan mencoba menjadi partai yang menampung - memperjuangkan semua kepentingan tanpa membedakan suku, agama, golongan, dan faham politik yang ada, akan tetapi pada kenyataannya tidak mudah untuk mempersatukan heterogenitas tersebut. Apalagi sejak awal PDI sudah terjebak pertikaian yang tak kunjung reda. Bagaimanapun juga, PDI yang bermetamorfosis menjadi PDI Perjuangan tumbuh ditengah iklim politik Orde Baru yang sangat menekan peran parpol. Sikap rezim Orde Baru yang koersif itu lahir dari trauma politik di jaman Orde Lama. Tegasnya, kebijakan politik pemerintah Orde Baru memandang parpol sebagai salah satu sumber disintegrasi nasional. Akibatnya, proses de-parpol-isasi terjadi di setiap lapisan masyarakat dan kehidupan parpol dipengaruhi oleh peran negara yang begitu dominan. Besarnya peran negara atas kehidupan PDI sudah tampak sejak proses penggabungan (fusi) partai-partai sampai dengan bulan Januari 1973, dan “penyelesaian” politik dari pemerintah atas segala perbedaan yang terjadi di internal mereka sesudah itu.

Kehadiran PDI Perjuangan dapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996 yang merupakan kelanjutan dari Kongres PDI di Medan pada tanggal 20-21 Juni 1996 sebagai konstruksi politik nasional. Kondisi itulah yang kemudian memaksa sebagian pendukung PDI pimpinan Megawati menyelenggarakan Kongres di Bali pada Oktober 1998 guna meneguhkan keberadaan mereka yang terpisah dari PDI pimpinan Budi Hardjono.<sup>8</sup> PDI hasil Kongres Bali sepakat menambahkan kata "Perjuangan" di belakang kata PDI untuk membedakan dengan PDI yang lain. Tidak hanya itu, di era reformasi PDI Perjuangan

<sup>7</sup> PDI Perjuangan merujuk kepada pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI.

<sup>8</sup> Baik PDI maupun PDI Perjuangan sama-sama menggunakan 10 Januari 1973 sebagai tanggal pendiriannya di Jakarta, yang merujuk kepada deklarasi fusi yang dilakukan oleh 5 parpol peserta pemilu 1971 yaitu: Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Murba, Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Kristen Indonesia. Herwinoto, *Partai-partai Politik Indonesia*, Jakarta: Litbang KOMPAS, 1999, Hal. 175-175 dan 191.

juga sempat beberapa kali mengalami perpecahan, hadirnya Partai Indonesia Tanah Air (PITA), Partai Nasional Banteng Kerakyatan (PNBK), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) sangat terkait erat dengan perpecahan didalam tubuh PDI Perjuangan, meskipun partai pecahan masih tetap ber-platform kebangsaan dan dua diantaranya gagal dalam pemilu 2004.

Persoalan lain yang membedakan PDI Perjuangan dengan PK Sejahtera adalah, jika perolehan suara PDI Perjuangan pada pemilu 1999 menobatkan dirinya menjadi peringkat pertama dengan perolehan suara 35.689.073 (33,7% sehingga meraih 153 kursi di DPR) namun di pemilu 2004 merosot ke peringkat kedua (109 kursi di DPR). Akan tetapi sebaliknya, grafik perolehan suara PK Sejahtera sebagai partai primordial meningkat setelah melakukan dua kali pemilu selama era reformasi. Artinya, primordialisme yang bersifat kosmopolitan dan kedaerahan sekalipun ternyata sama – sama memiliki pendukung signifikan.<sup>9</sup> Jika demikian, maka sikap a-priori atas fungsi *interest agregasi* dari parpol pada konteks integrasi nasional dapat dibenarkan.

Jadi sejak awal PK Sejahtera dimaksudkan sebagai organisasi politik berdasarkan alasan-alasan kultural. Mereka mengidentifikasi diri sebagai parpol yang berlandaskan Islam. Sedangkan PDI Perjuangan pasca Orde Baru mengidentifikasi diri mereka sebagai partai Nasionalis-Soekarno. <sup>10</sup> Dengan demikian, mengkaji kedudukan dan peranan dari kedua partai amat penting bagi ketahanan nasional. Sebab ketahanan nasional dari suatu bangsa akan selalu berkorelasi dengan stabilitas politik dan kesejahteraan secara ekonomi. Masalahnya, bila esensi dari stabilitas nasional dalam aspek politik bisa dimaknai sebagai ikhtiar membentuk tatanan masyarakat yang demokratis dan beradab, dimana didalamnya terdapat harmoni sosial, partisipasi politik masyarakat yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab, untuk kemudian melakukan pembangunan disegala bidang agar tercapai tujuan nasional. Namun pada kenyataannya, hadirnya banyak parpol justru menghambat pewujudan stabilitas politik karena masih berpolemik dengan identitas partai itu sendiri untuk kemudian diperjuangkan menjadi identitas nasional.

---

<sup>9</sup> Kosmopolitan adalah Paham (gerakan) yang berpandangan bahwa seseorang tidak perlu mempunyai kewarganegaraan, tetapi menjadi warga negara dunia, paham internasional. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 528.

<sup>10</sup> Hal ini nampak dari penempatan almarhum Bung Karno sebagai Votegetter, termasuk Pancasila 1 Juni 1945 sebagai platform / ideologi partai.



Untuk itu, dalam rangka memperkuat ketahanan nasional – dibutuhkan parpol yang memiliki karakter demokratis sekaligus bersifat terbuka untuk semua golongan. Eksistensi PDI Perjuangan memiliki karakter yang cocok dalam upaya memperkokoh stabilitas ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Namun tidak demikian halnya dengan PK Sejahtera sebagai parpol yang mendasarkan diri pada aspek primordial. Padahal keduanya memiliki jaringan kuat hingga menjangkau ke pelosok desa, dengan jaringan infrastruktur politik yang ada - mereka menjadi memiliki peran penting bagi ketahanan nasional ditengah-tengah situasi politik transisional. Akan tetapi perbedaan platform dapat menjadi kendala bagi arah pembangunan bangsa dan negara, *nation and character building - state building*.

Dengan demikian, kedua parpol bisa dijadikan sample penelitian atas peranan parpol terhadap integrasi nasional pasca Orde Baru (era reformasi) yang dikhawatirkan menjadi pendorong bagi timbulnya disintegrasi bangsa. Karena bagaimanapun juga ada kecenderungan dari parpol untuk membangkitkan sentimen primordial. Perluasan partisipasi masyarakat dan distribusi kekuasaan dengan elit lokal juga sering dikaitkan dengan fragmentasi sosial politik yang sudah tertanam, seperti pemekaran daerah, otonomi khusus, pemilihan kepala daerah, dan sebagainya. Dengan demikian maka peran parpol dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia menjadi sangat penting, disamping keberadaannya untuk mempengaruhi partisipasi, artikulasi, dan regulasi politik yang memperoleh legitimasi secara sosial. Sebab parpol bisa menjadi pengatur perselisihan (perbedaan) yaitu kemampuan untuk mengatur jenis serta tingkat tuntutan yang selalu berubah dan dilakukan atas suatu sistem termasuk dalam menciptakan integrasi nasional. Dengan begitu maka keberhasilan parpol menangani masalah perselisihan menentukan fungsinya sebagai lembaga pengintegrasi dalam mengagregasi aspirasi.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Kelembagaan parpol yang bersifat nasional dan memiliki perwakilan sampai dengan unit pengorganisasian terkecil di masyarakat, ternyata tidak cukup efektif mewujudkan integrasi nasional secara menyeluruh. Apalagi reformasi melahirkan sistem multi partai. Ironisnya, sampai kini belum ada parpol dengan capaian suara diatas 50% (mayoritas), padahal sudah melakukan dua kali pemilu. Kondisi itu mengharuskan parpol berkoalisi dengan parpol lain walaupun seringkali menimbulkan persoalan baru. Bertitik tolak dari pandangan ini, pengkajian dipusatkan pada arah perkembangan dan usaha Peranan partai politik..., Achmad Suhawi, Pascasarjana-UI, 2008

parpol dalam upaya mewujudkan integrasi nasional pada era reformasi dengan menggunakan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan parpol era reformasi terhadap integrasi nasional?
2. Bagaimana peranan PDI Perjuangan dan PK Sejahtera terhadap integrasi nasional?
3. Bagaimana upaya parpol era reformasi dalam menata kehidupan politik nasional guna mewujudkan ketahanan nasional dalam rangka mencegah disintegrasi?

### **I.3. Tujuan Penelitian.**

Sejalan dengan permasalahan yang sudah dirumuskan diatas, penelitian bertujuan:

1. Mendeskripsikan peranan parpol dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat dalam menjaga kohesifitas bangsa Indonesia.
2. Mengkaji peranan PDI Perjuangan dan PK Sejahtera dalam meningkatkan aspek integrasi nasional.
3. Mengkaji implikasi reformasi bagi ketahanan nasional dimana PDI Perjuangan dan PK Sejahtera menjadi aktor demokrasi yang diakui secara konstitusional.

### **I.4. Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Menjadi bahan kajian yang holistik atas peran parpol dalam mewujudkan integrasi nasional.
2. Adanya strategi alternatif dalam meningkatkan ketahanan nasional dengan mengoptimalkan peranan parpol.
3. Menjadi bahan masukan dalam mengatasi gejala disintegrasi nasional selama transisi demokrasi.

### **I.5. Ruang Lingkup.**

Penelitian dilakukan pada parpol peserta Pemilihan Umum dengan melakukan *transferability* terhadap obyek agar dapat diterapkan pada situasi sosial atau tempat lain. Maka dari itu penelitian akan menggunakan *purposive sampling*, dengan demikian diperolehlah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai obyek penelitian.

Purposive sampling didasarkan pada pertimbangan representasi untuk memperoleh hasil yang holistik, integratif, dan komprehensif. Karena Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan merupakan kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia sebagai hasil fusi dari 5 (lima) partai politik peserta pemilu di rezim Orde Lama sampai reformasi, disamping paling banyak mengalami perpecahan organisasi. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera adalah partai kader berbasis Agama yang muncul kepermukaan seiring dengan reformasi, walaupun cikal-bakalnya telah ada jauh hari sebelumnya.

## **I.6. Metodologi Penelitian.**

### **I.6.1. Metode Penelitian**

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.

### **I.6.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada PK Sejahtera dan PDI Perjuangan di Jakarta (Dewan Pimpinan Pusat) karena sangat terkait dengan ketersediaan data dan sumber informasi. Adapun waktu untuk mengumpulkan data selama 3 (tiga) bulan, yakni dari bulan Agustus-Oktober 2007.

### **I.6.3. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagai bagian dari penelitian kualitatif maka data yang digunakan berasal dari sumber primer dan sumber sekunder, meliputi:

#### **I.6.3.1. Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih optimal dengan menyampaikan pertanyaan kepada informan yang sudah ditentukan. Peneliti menggunakan wawancara *semiterstruktur* agar dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara dimintakan pendapat dan ide - idenya.

#### **I.6.3.2. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk memperoleh data dari sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian, meliputi buku teks, majalah-majalah ilmiah, sumber-sumber berita, arsip atau dokumen resmi, dan hasil-hasil penelitian atau laporan penelitian.

### **I.6.3.3. Data Statistik**

Data statistik merupakan sumber data yang digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan data statistik yang sudah tersedia, terutama data yang dikeluarkan oleh BPS, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) parpol, atau lembaga swasta sebagai sumber data tambahan yang bisa mendukung penelitian ini. Data statistik dapat membantu dan memberikan gambaran kepada peneliti mengenai komposisi perolehan suara, sebaran pendukung, program perjuangan, kecenderungan / pendapat masyarakat secara umum. Data statistik itu kemudian dikomparasikan dengan peristiwa yang terkait dengan penelitian.

### **I.6.4. Teknik Analisa Data**

Analisis data sudah dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai mengumpulkan data dilapangan. Artinya, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban informan sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang kredibel. Jadi aktivitas peneliti dalam melakukan analisa data meliputi : data reduction, data display, dan verification.

### **I.6.5. Unit Analisis**

Dalam melakukan penelitian untuk penyusunan tesis ini, peneliti melakukan wawancara kepada Pengurus Harian DPP PDI Perjuangan dan PK Sejahtera sebagai unit analisis. Namun untuk memahami keberadaan parpol tidak bisa dipisahkan dengan realitas yang melingkupi dirinya, sehingga kajian dilakukan pada sistem kepartaian, pemilihan umum, dan sistem perwakilan baik di era reformasi maupun masa sebelumnya. Hal itu bisa menjadi bahan perbandingan. Untuk memudahkan dalam menganalisis hasil penelitian, perlu ditetapkan indikator sebagai berikut:

- a. Ideologi atau asas parpol sebagai dasar pelaksanaan program dan kebijakan dari partai bersangkutan.
- b. Pola rekrutmen, meliputi: anggota / kader, pengurus, calon / anggota legislatif maupun eksekutif.

- c. Kebijakan partai yang terkait dengan masalah integrasi nasional.
- d. Sebaran dukungan, baik dari segi teritorial maupun etnis / budaya.
- e. Pola pengorganisasian pengurus, jalur komunikasi, penyerapan aspirasi, dan sebagainya.

Sedangkan tokoh dari PDI Perjuangan dan PK Sejahtera yang dimintai keterangan adalah mereka yang saat ini menduduki jabatan di pengurus pusat, diantaranya Pramono Anung, Guruh Soekarnoputra, Soewarno, ketiga orang ini merupakan unsur pimpinan PDI Perjuangan sementara dari DPP PK Sejahtera ialah Mahfudz Sidiq, Untung Wahono, dan Ahmad Zainuddin.

## **I.7. Sistematika Penulisan.**

Untuk memudahkan pemahaman, tesis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan.**

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka.**

Memuat teori yang berkaitan dengan peranan, partai politik, integrasi nasional, dan ketahanan nasional.

### **BAB III Peranan Integrasi Nasional Partai Politik.**

Mendeskripsikan peranan partai politik dalam membangun integrasi nasional termasuk dengan segala pasang-surutnya, serta deskripsi umum tentang obyek penelitian.

### **BAB IV Pembahasan.**

Memuat hasil penelitian dan pembahasan dengan menyajikan secara deskriptif analitis.

### **BAB V Kesimpulan dan Saran**

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dipandang perlu.